

## AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN ETIKA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Kamelia<sup>1\*</sup>, Lince Bulutoding<sup>2</sup>, Sapril Sardi Juardi<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>[Kameliajupri@gmail.com](mailto:Kameliajupri@gmail.com), <sup>2</sup>[Sapril.sardi@uin-alauddin.ac.id](mailto:Sapril.sardi@uin-alauddin.ac.id), <sup>3</sup>[Lincebulutoding20@gmail.com](mailto:Lincebulutoding20@gmail.com)

**Abstract,** *This study aims to examine the effect of accountability, transparency and the application of accounting standards on the quality of financial statements. In addition, this study also examines whether ethics can moderate the relationship between accountability, transparency, and the application of accounting standards to the quality of financial statements. This research is quantitative research with a descriptive approach. The population in this study were employees who worked in the Enrekang Regency Regional Work Unit with purposive sampling technique. The results of multiple linear analysis show that accountability and the application of accounting standards have a positive and significant effect on the quality of financial statements. While transparency has a negative effect on the quality of financial statements on the quality of financial statements. The moderating variable, namely ethics, is able to moderate accountability on the quality of financial statements while ethics are not able to moderate transparency and the application of accounting standards to the quality of financial statements. The implication of this research is that in an effort to improve the quality of financial statements, organizations must pay special attention to the level of accountability and the application of accounting standards.*

**Keywords:** *Accountability, transparency, the application of accounting standards, ethics, and the quality of financial statements*

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga menguji apakah etika mampu memoderasi hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah pegawai yang bekerja di pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil analisis linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan transparansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel moderasi yaitu etika mampu memoderasi akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan etika tidak mampu memoderasi transparansi dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, organisasi harus memberikan perhatian khusus pada tingkat akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, transparansi, penerapan standar akuntansi, etika, dan kualitas laporan keuangan*

### PENDAHULUAN

\*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia, setelah era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal, telah mengalami peningkatan yang signifikan (Pangalo, 2018). Perubahan ini fokus pada pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya globalisasi yang semakin merajalela dan menuntut tingkat kompetitivitas yang tinggi di setiap negara, pemerintah daerah pun harus menjawab tantangan tersebut (Ismirathul Wahyu et al., 2022). Di sini, peningkatan kemandirian pemerintahan menjadi kunci untuk mencapai daya saing yang diharapkan. Fenomena peningkatan tuntutan terhadap akuntabilitas lembaga-lembaga publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas diartikan sebagai komitmen untuk memikul tanggung jawab atas pencapaian misi organisasi atau tujuan yang telah ditentukan (Wijaya, 2019). Hal ini dilakukan melalui suatu mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala (Hasliani & Yusuf, 2021). Fenomena ini mencerminkan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik yang dilakukan oleh entitas pemerintah, termasuk baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah (Vidyasari, 2021).

#### Daftar Opini LKPD Kabupaten Enrekang

No	Tahun	Opini
1.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Setiap tahun, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan pendapat berdasarkan penilaian tersebut, ketika BPK menerbitkan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas publik disajikan dan dipublikasikan secara jujur dan berkualitas. Penilaian ini sesuai dengan standar kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan Kabupaten Enrekang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit tersebut telah diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk kelima kalinya secara berturut-turut yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Enrekang kerap menghadapi masalah di mana anggaran sering kali disusun dengan jumlah yang lebih kecil daripada potensi pendapatan yang sebenarnya dapat diperoleh (Kartika, 2020).

Ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu alasan mengapa sistem akuntansi di daerah seringkali dinilai lemah. Sekarang ini, tingkat kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Tahir et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat memberikan kepuasan dan keyakinan kepada masyarakat (Vidyasari, 2021). Konsep akuntabilitas adalah prinsip yang menegaskan bahwa semua tindakan dan hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Wijaya, 2019). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup tanggung jawab terkait dengan kebenaran keuangan, pengungkapan informasi, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Riyanti, 2017).

Selain penerapan prinsip akuntabilitas, peningkatan kualitas laporan keuangan daerah juga dapat ditingkatkan melalui upaya untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam instansi. Penelitian Suwinto & Jannag, (2022) menjelaskan transparansi sebagai elemen kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Transparansi merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik. Transparansi didasarkan pada prinsip bahwa informasi mengalir dengan bebas, seluruh proses administrasi dan lembaga harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus cukup jelas untuk dipahami dan diawasi. Gagasan ini diperkuat oleh hasil penelitian Lutfiyya & Akhirson, (2022), yang menjelaskan bahwa transparansi mencakup penyediaan

informasi pemerintah kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan memadai, terutama berkaitan dengan pelaporan anggaran publik.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib mematuhi SAP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Langelo & Alexander, 2015). Menurut Sako, (2018) Penerapan SAP oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan informasi yang dihasilkan. Meskipun perundang-undangan dan peraturan terkait pengelolaan keuangan negara sudah cukup baik, pelaksanaannya masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dana publik. Kondisi ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang didapatkan oleh setiap unit kerja pemerintahan (Panggalo, 2018). Penelitian Andriany & Antoine, (2019) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berdampak positif dan signifikan pada kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian ini menggunakan etika sebagai variabel yang memoderasi hubungan akuntabilitas, transparansi dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas keuangan. Etika adalah seperangkat norma perilaku atau pedoman perilaku yang diterima dan dipraktikkan oleh individu atau kelompok tertentu. Norma etika mengatur kapan suatu tindakan dapat diterima dan kapan tindakan tersebut dianggap tidak pantas atau salah. Adopsi sikap mental dan etika yang positif dalam proses penyusunan laporan keuangan akan meningkatkan nilai laporan keuangan tersebut. Sebaliknya, jika terdapat sikap mental dan etika yang kurang baik dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini akan menciptakan citra negatif terhadap kualitas laporan (Rahmadhani, 2021).

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bagian ini memuat kajian teori sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Sebaiknya, memprioritaskan hubungan antar variabel dalam penelitian atau penjelasan teori yang fokus. Lebih disukai, penulisan definisi dan pengertian dihindari. Karena prioritas tinjauan literatur adalah landasan teoretis yang digunakan oleh penulis/peneliti sebagai dasar pembentukan badan analisis penelitian. Sangat direkomendasikan bahwa literatur yang dirujuk diterbitkan tidak lebih dari sepuluh tahun. Juga, disarankan untuk memprioritaskan literatur sebagai urutan berikut: jurnal internasional terkemuka, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional, simposium internasional, simposium nasional, dan buku teks.

### ***Agency Theory***

Teori ini diajukan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi mengidentifikasi ketidakseimbangan informasi dalam relasi antara pihak prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah sebagai agen memiliki akses pada informasi yang lebih lengkap dan harus menyediakan informasi yang jujur untuk memastikan kualitas kinerja yang diberikan kepada masyarakat. Teori agensi juga memberikan penjelasan mengenai cara pimpinan mendelegasikan tugas kepada bawahan, dan bagaimana bawahan menjalankan tugas tersebut untuk mencapai tujuan pimpinan. Namun, dalam hubungan antara pimpinan dan bawahan sering kali timbul masalah yang dikenal sebagai masalah agensi, di mana kepentingan pribadi atau konflik kepentingan dapat muncul (Syahrir, 2017).

Teori agensi berusaha menangani dua masalah yang berkaitan dengan agensi. Masalah pertama adalah pengawasan (pengawasan). Masalah ini muncul ketika prinsipal (pemilik atau pengendali) tidak dapat dengan pasti memastikan apakah agen (pihak yang bertindak atas nama prinsipal) bertindak dengan benar atau sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam kasus seperti ini, teori agensi mencari cara untuk memastikan bahwa agen dipantau dengan efektif untuk mengurangi perilaku yang tidak menguntungkan. Masalah kedua adalah pembagian risiko (risk sharing) ini terutama menjadi masalah ketika prinsipal dan agen tidak sependapat tentang risiko yang terkait dengan keputusan atau tindakan tertentu. Dalam situasi seperti ini, teori agensi mencari cara untuk mengatur kontrak atau insentif sehingga prinsipal dan agen memiliki insentif yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama. Teori keagenan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubungan keagenan, seperti ketika prinsipal tidak dapat memastikan apakah agen telah bertindak dengan benar atau ketika principal dan agent memiliki perspektif yang berbeda tentang (Novelia, 2021).

### **Deontological Theory**

Istilah "deontologi" berasal dari kata Yunani "deon," yang merujuk pada "kewajiban" atau "sesuatu yang diwajibkan." Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant (1724-1804). Menurut teori ini, penilaian baik dan buruknya suatu perilaku didasarkan pada kewajiban. Suatu tindakan dianggap baik karena merupakan kewajiban untuk dilakukan, sedangkan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dianggap buruk dan harus dihindari (Akbar dan Wawo, 2016). Teori ini menekankan bahwa penilaian moral tidak bergantung pada akibat dari tindakan tersebut, tetapi pada kewajiban yang ada.

Prinsip deontologi menegaskan bahwa konsekuensi dari tindakan tersebut bukanlah pertimbangan utama. Sebuah tindakan tidak menjadi baik karena hasilnya yang baik, melainkan karena kewajiban untuk melakukannya (Mohammad, 2018). Ada beberapa bentuk teori deontologi, yaitu: deontologi tindakan, seperti yang terdapat dalam eksistensialisme (etika situasi), dan deontologi peraturan, seperti Prinsip Kewajiban. Deontologi peraturan menyatakan bahwa penilaian moral didasarkan pada standar yang berlaku, bukan pada kepuasan atau penderitaan. Tindakan yang sesuai dengan peraturan dianggap moral. Sementara itu, deontologi tindakan berpendapat bahwa kebermanusiaan suatu perilaku bergantung pada cara tanggung jawab kita terhadap orang lain.).

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Secara sederhana, laporan keuangan adalah dokumen yang memberikan gambaran tentang situasi keuangan organisasi pada saat ini atau dalam jangka waktu tertentu (Rochman dan Pawenary, 2020). Kualitas laporan keuangan dapat diukur sejauh mana informasinya secara konsisten memenuhi persyaratan dan memenuhi harapan semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk melaksanakan tugas atau proses mereka (Sari, 2022). Laporan keuangan yang baik harus mematuhi prinsip dan aturan standar akuntansi yang berlaku. Ini berarti laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Untuk memastikan kualitasnya, laporan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria penting, termasuk relevansi, keandalan, keberbandingan, dan kemudahan pemahaman. Kriteria ini sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah (Bulutoding et al., 2021).

### **Etika**

Variabel moderasi dapat memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel dependen, baik dengan memperkuat atau memperlemahnya, dan sifat pengaruhnya bergantung pada nilai variabel moderasi. Variabel moderasi sering disebut juga sebagai variabel kontingensi karena pengaruhnya bergantung pada konteks tertentu. Etika, pada dasarnya, mencakup aspek-aspek yang membantu dalam memahami dan menginterpretasikan perilaku moral individu dan sosial secara sistematis (Bulutoding et al., 2024). Etika secara umum merujuk pada perilaku atau tindakan masyarakat yang telah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara konsisten dalam berbagai aktivitas (Alfiyyah dkk., 2022). Ini juga membantu dalam menciptakan aturan yang mengontrol perilaku manusia dan menetapkan nilai-nilai yang kuat sebagai panduan dalam kehidupan (Yanti, 2020).

Etika dalam penyusunan laporan keuangan mencakup sejumlah prinsip dasar yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan. Ini termasuk karakteristik seperti ketepatan, pengungkapan informasi, pertimbangan biaya dan manfaat, serta tanggung jawab (Alfiyyah et al., 2022). Pentingnya etika dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya terbatas pada keuntungan pihak internal, tetapi juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan pihak eksternal (Bulutoding et al., 2020).

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan langkah bertanggung jawab secara berkala dalam mencapai tujuan ketika menjalankan kebijakan manajemen alokasi sumber daya yang diberikan kepada sebuah organisasi, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Konsep akuntabilitas ini memegang peranan penting dalam kesuksesan suatu organisasi dalam menerapkan sistem penganggaran, dan hal tersebut dapat membantu organisasi mempertahankan kepercayaan publik (Ariani et al., 2022).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan integritas keuangan, tingkat pengungkapan informasi, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku (Riyanti, 2017). Menurut Ariani dkk., (2022) Akuntabilitas merupakan kewajiban sebuah organisasi yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik. Ini merupakan suatu mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan kode etik, serta tetap bertanggung jawab atas tindakan di masa lalu dan di masa depan guna menerapkan pemerintahan yang akuntabel:

### **Transparansi**

Transparansi adalah suatu prinsip yang bertujuan untuk membangun saling kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, sehingga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah ke informasi yang mereka butuhkan partisipasi dalam pengelolaan daerah (Ferlia dkk., 2023). Transparansi adalah kondisi di mana setiap individu memiliki akses untuk mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam administrasi umum (Achmad dkk., 2021). Ketika tingkat transparansi rendah, seperti kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum, maka pelanggaran hukum dapat meningkat karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan mereka.

Transparansi membantu membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat memiliki pemahaman terhadap kegiatan pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal penting bagi keberhasilan pemerintah, dan kepercayaan ini dapat berujung pada dukungan terhadap program pemerintah (Majid, 2020). Transparansi dibangun berdasarkan prinsip arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses administrasi, kelembagaan dan informasi harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang diberikan harus cukup dan dapat dipahami, sehingga dapat dikendalikan dengan baik (Hamsinar, 2022). Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan memiliki kriteria seperti pertanggungjawaban yang terbuka dan aksesibilitas terhadap laporan keuangan.

### **Penerapan Standar Akuntansi**

Standar akuntansi pemerintahan pada umumnya mengatur tata cara penyajian laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan perbandingan antara laporan keuangan dengan anggaran, periode, dan satuan. Laporan keuangan yang bersifat umum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar akuntansi pemerintahan mengatur semua aspek yang terkait dengan penyajian laporan keuangan, memberikan panduan tentang format laporan keuangan, dan menetapkan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan (Erna, 2020). Penerapan praktik akuntansi negara memerlukan entitas pelapor, termasuk pemerintah daerah, untuk menyusun laporan yang terstruktur dan sistematis mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam periode pelaporan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, tata kelola, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja (Amalia, 2020).

Standar akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perbandingan laporan keuangan dengan anggaran, periode, dan satuan pengukuran. Oleh karena itu, standar ini menetapkan prinsip-prinsip keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pembukuan tahunan negara mengikuti standar akuntansi ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pembukuan tahunan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, termasuk memastikan konsistensi, komparabilitas, pemahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Susilawati & Riana, 2022).

### **Pengembangan Hipotesis**

Teori agensi, yang diusulkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menjelaskan bahwa akuntabilitas melibatkan kewajiban pihak yang memiliki mandat (pemerintah) untuk memberikan laporan, menyajikan informasi, melaporkan aktivitas, dan mengungkapkan semua tindakan yang merupakan tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan mandat (masyarakat). Akuntabilitas memainkan peran kunci dalam kesuksesan suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan dan sistem penganggaran, yang pada akhirnya membantu menjaga kepercayaan publik (Rigian & Sari, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Akbar (2022), menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian Hamsinar (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan Sejalan dengan penelitian (Nababan dkk 2018; Setiyaningrum, 2017; Laksita dan Sukirno, 2019; Yusri, 2022) yang menyatakan bahwa semakin baik akuntabilitas maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin baik:

**H1: Akuntabilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Teori agensi yang membahas hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks penelitian sebelumnya, prinsipal memberikan tugas kepada agen untuk melakukan tugas tertentu yang menguntungkan prinsipal, dan ini sering melibatkan delegasi otoritas dalam pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Transparansi didasarkan pada prinsip informasi yang mengalir secara bebas, di mana seluruh proses pemerintahan dan lembaga harus terbuka untuk diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu, informasi yang tersedia juga harus cukup jelas dan dapat dipahami sehingga dapat dimonitor dengan baik (Coryanata, 2012). Transparansi adalah mempermudah akses informasi kondisi keuangan yang dapat dijangkau dan dipahami oleh pihak masyarakat yang berkepentingan, didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat berhak untuk memahami secara transparan dan lengkap bagaimana pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Pada penelitian Tahir dkk, (2021), Adiwirya dan Sudana, (2015) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Tapi tidak sejalan dengan penelitian (Riyanti, 2017; Septiningtyas, 2017; Putri dan Akbar, 2022) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan:

**H2: Transparansi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Teori agensi dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mematuhi peraturan yang tercermin dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar, dan hal ini akan berdampak pada tingkat akuntabilitas. Organisasi harus mengikuti nilai-nilai sosial dan lingkungan untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam menjalankan kegiatan mereka (Hanifah, 2021). Tujuan utama dari penerapan standar akuntansi adalah untuk mengoptimalkan hasil pelaporan keuangan dengan mencakup berbagai pencatatan transaksi yang jelas dan rinci. Implementasi penerapan standar akuntansi ini menekankan pencatatan transaksi keuangan dengan cepat saat transaksi tersebut terjadi, tanpa mempertimbangkan saat kas sebenarnya diterima atau dibayarkan. Penelitian Andrianary dan Antoine, (2019) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdampak positif dan signifikan pada kualitas Laporan Keuangan. Didukung oleh penelitian (Qomah, 2021; Pujanira dan Taman, 2017; Jati, Ikriyati dan Aprila, 2019) yang menyimpulkan jika Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan juga akan menjadi baik:

**B3: Penerapan Standar Akuntansi Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Teori deontologi menegaskan bahwa praktisi memiliki kewajiban moral yang mutlak untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran, tanpa mempertimbangkan tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, praktisi akan melihat akuntabilitas sebagai kewajiban moral untuk memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dengan akurat dan jujur kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya untuk memenuhi target atau kepentingan pribadi. Sejumlah aspek kunci dalam penghayatan etika yang harus diperhatikan yaitu, keterikatan individu terhadap diri dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, berusaha selalu melakukan pekerjaan dengan cara yang sah atau halal Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap semua pemangku kepentingan dan memastikan integritas, transparansi, dan kewajaran dalam proses penyusunan laporan keuangan, praktisi akuntansi yang menerapkan etika terhadap akuntabilitas cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas secara etis (Bulutoding et al., 2021). Didasarkan pada keyakinan bahwa praktisi yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika akan lebih mungkin membuat keputusan

yang memperhatikan kepentingan semua pihak terlibat dan memprioritaskan akurasi dan relevansi informasi keuangan dari pada hanya memenuhi target. Dalam konteks ini, akuntabilitas sebagai kewajiban moral untuk memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dengan akurat dan jujur kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya untuk memenuhi target atau kepentingan pribadi.

#### **H4: Etika Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Prinsip teori deontologi menekankan pentingnya melaksanakan kewajiban moral yang tidak dapat dikompromikan, terlepas dari konsekuensi atau hasil akhirnya. Praktisi akuntansi, sebagai agen moral, memiliki kewajiban etis untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam menyusun laporan keuangan, yang merupakan kewajiban moral yang mendasar yang tidak dapat ditawar (Majid et al., 2022). Dalam konteks etika, perlu diperhatikan bahwa konsep diri seseorang terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam pengelolaan asetnya sebagai individu yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Setiap individu memiliki pandangan pribadi yang memengaruhi perilaku etikanya, sesuai dengan peran yang dimilikinya. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan keterbukaan dalam proses penyusunan laporan keuangan, praktisi akuntansi yang menerapkan pendekatan moderatif terhadap transparansi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas secara etis

#### **H5: Etika Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dengan mempertimbangkan kewajiban moral yang mutlak yang dituntut oleh teori deontologi, akuntansi yang menerapkan pendekatan terhadap penerapan standar akuntansi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas secara etis. praktisi akuntansi memiliki kewajiban moral untuk menerapkan standar akuntansi dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, tanpa memperhitungkan tekanan dari pihak lain seperti manajemen. Sikap mental positif dan etika yang baik dalam menyusun laporan keuangan dapat meningkatkan nilai tambah pelaporan keuangan, sedangkan sikap mental dan etika yang buruk dalam menyusun laporan keuangan dapat merugikan citra pelaporan keuangan (Bulutoding et al., 2020). Etika adalah seperangkat nilai dan standar perilaku yang diakui dan diikuti oleh individu atau kelompok tertentu. Aturan etis membantu menentukan kapan perilaku tertentu dapat diterima atau dianggap benar, serta kapan perilaku tersebut dianggap tidak dapat diterima atau salah. Sebaliknya, jika ada ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam pembuatan laporan keuangan, hal ini dapat merusak reputasi laporan keuangan.

#### **H6: Etika Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Yam & Taufik, 2021). Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi (X2), penerapan standar akuntansi (X3), sebagai variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen, serta etika (M) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang. Populasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang. Dalam proses pengambilan sampel, metode non-probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Etikan, 2017). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 SKPD.

Dalam penelitian ini, menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur efektivitas variabel tanggung jawab (X1), transparansi (X2), penerapan standar akuntansi (X3), dan etika (M) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Peneliti menggunakan kuesioner berbentuk tertutup, yang artinya responden hanya perlu memberikan tanda centang (√) pada kolom

atau spasi yang sesuai. .Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden tentang fenomena sosial. Variabel yang akan diukur dibagi menjadi indikator-indikator, dan indikator tersebut dijadikan dasar untuk menyusun item-item instrumen seperti pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner. Setiap item dari indikator tersebut akan diberikan skor berdasarkan skala Likert, yang berupa: Sangat Setuju (SS) = skor 1, Setuju (S) = skor 2, Netral (N) = skor 3, Tidak Setuju (TS) = skor 4, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 5.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

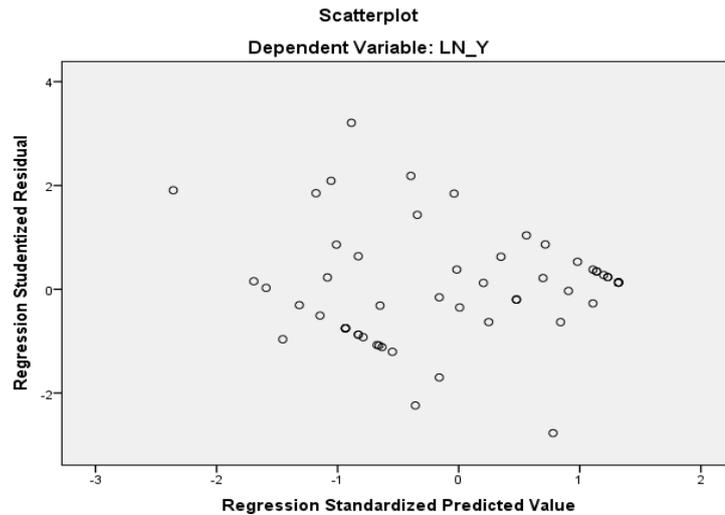
### **HASIL**

Dalam penelitian ini hasil pengujian kualitas data menggunakan dua uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden. Dengan nilai alpha sebesar 0,05 nilai r tabel yang didapatkan adalah 0,2144. Oleh karena itu, item pernyataan dianggap valid jika nilai korelasi (r hitung) lebih besar dari 0,2144. Pengukuran reliabilitas data dapat dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's alpha di mana suatu instrumen dianggap reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas (Cronbach's alpha) sebesar 0,60 atau lebih. Pengukuran reliabilitas data dapat dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach alpha, di mana suatu instrumen dianggap reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas (Cronbach's alpha) sebesar 0,60 atau lebih. Hasil uji reliabilitas didapat nilai variabel akuntabilitas sebesar 0.895, transparansi sebesar 0.871, Penerapan Standar Akuntansi sebesar 0.862, Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0.879, dan Etika sebesar 0.866. sehingga penelitian ini dianggap reliabel. Selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah nilai residu memiliki distribusi normal. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residu berdistribusi normal, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian uji normalitas ditemukan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 yaitu sebesar 0,216 yang menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Tujuan dari pengujian multikolinearitas adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi. nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai yang kurang dari 10, dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi, karena nilai VIF yang rendah menandakan bahwa variabel independen tidak berkorelasi tinggi satu sama lain. Sedangkan nilai toleransi yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memberikan informasi yang cukup unik dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variansi yang tidak sama antar observasi dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Jika scatterplot tidak menunjukkan pola yang teratur maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mempunyai masalah heteroskedastisitas. Berikut gambar grafiknya:

### **Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot**



Sumber : Data Primer, diolah 2024

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa *grafik scatterplot* antara SRESID (residual standar) dan ZPRED (nilai prediksi) menunjukkan pola penyebaran yang acak, di mana titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan berdasarkan variabel akuntabilitas, transparansi, penerapan standar akuntansi, dan etika. Uji Glejser adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam model regresi. Caranya adalah dengan memeriksa apakah variansi residual bertambah atau berkurang seiring dengan nilai-nilai dari satu variabel independen tertentu. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji Glejser lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas. Namun hasil penelitian ini menunjukkan nilai uji glejser lebih besae dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai R2 (*adjusted R-squared*) dari model regresi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dari hasil pengujian, terlihat bahwa nilai R2 adalah 0,604, yang berarti bahwa 60% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan penerapan standar akuntansi. Sisanya, sebesar 40%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian simultan regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai F hitung sebesar 31,034 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang menunjukkan signifikansi pada tingkat 0,05. Lebih lanjut, nilai F hitung yang melebihi nilai F tabel (2,769 dengan df1=3 dan df2=56) menandakan bahwa secara bersama-sama, akuntabilitas, transparansi, dan penerapan standar akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya dapat dilihat hasil uji parsial (Uji t) untuk regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.785	1.898		2.521	.015
Akuntabilitas	.257	.077	.329	3.326	.002

Transparansi	.174	.090	.194	1.933	.058
Penerapan Standar Akuntansi	.376	.092	.429	4.066	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan  
Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan hasil dari tabel terlihat bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 3,326, yang lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi  $\alpha=0,05$  dan derajat kebebasan  $df = n-k$ , yaitu 56 (60-4), yang besarnya 2,003. Koefisien beta unstandardized untuk akuntabilitas adalah 0,375 dengan tingkat signifikansi 0,002, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ( $H1$ ). Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan dalam akuntabilitas akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan tabel, dapat diamati bahwa variabel transparansi memiliki nilai t hitung sebesar 1,933, yang lebih besar dari nilai t tabel untuk tingkat signifikansi  $\alpha=0,05$  dan derajat kebebasan  $df = n-k$ , yaitu 56 (60-4), yang nilainya adalah 2,003. Namun, tingkat signifikansi adalah 0,058, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Ini menunjukkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ( $H2$ ).

Berdasarkan tabel, variabel penerapan standar akuntansi memiliki nilai t hitung sebesar 4,066, yang melebihi nilai t tabel untuk tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan derajat kebebasan  $df = n-k$ , yaitu 56 (60-4), yang nilai t tabelnya adalah 2,003. Tingkat signifikansi untuk variabel ini adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ( $H3$ ). Kemudian uji t untuk regresi moderasi dengan pendekatan selisih mutlak dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji T - Uji Parsial  $H_4$ ,  $H_5$ , dan  $H_6$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.156	.097		-1.602	.115
Zscore: Akuntabilitas	.362	.088	.362	4.116	.000
Zscore: Transparansi	-.040	.094	-.040	-.421	.675
Zscore: Penerapan Standar Akuntansi	.316	.117	.316	2.700	.009
Zscore: Etika	.531	.086	.531	6.205	.000
X1M	.320	.106	.245	3.007	.004
X2M	-.021	.141	-.013	-.148	.883
X3M	-.086	.129	-.068	-.667	.508

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Nilai Koefisien unstandar pada M adalah 0,531 dengan standar error 0,086 dan nilai t sebesar 6,205 dengan signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa etika profesi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai signifikansinya adalah  $0,000 < 0,05$  dalam hal ini, variabel moderasi (etika) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Selanjutnya untuk tingkat signifikan dari akuntabilitas dan etika X1M ( $b_3$ ) yaitu sebesar 0,004 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti  $b_3$  menunjukkan bahwa signifikan. Karena pada hasil koefisien  $b_2$  signifikan dan untuk  $b_3$  signifikan, maka disimpulkan untuk penggunaan etika termasuk dalam kategori quasi moderasi atau dapat diartikan bahwa variabel etika tidak sepenuhnya memoderasi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi memiliki pengaruh moderasi yang cukup kuat. Etika memainkan peran penting dalam hubungan antara akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, meskipun tidak sepenuhnya memoderasi hubungan secara mutlak. Namun, etika memiliki pengaruh yang signifikan meskipun bukan satu-satunya faktor penentu hubungan tersebut.

Pada hasil dari uji untuk nilai selisih mutlak pada tabel diatas memperlihatkan bahwa variabel moderating X1M memiliki thitung yaitu sebesar 3,007 yang menunjukkan

nilai yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,003 dengan tingkat signifikan sebesar 0,004 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien untuk beta unstandardized moderasi antara variabel akuntabilitas dengan etika sebesar 0,320. Hal ini menunjukkan kalau variabel etika merupakan variabel moderasi yang mampu memperkuat hubungan variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi untuk hipotesis keempat yang menyatakan bahwa etika memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan (H4) diterima.

Selanjutnya untuk hasil uji pada tabel diatas dapat dilihat etika (b2) memiliki tingkat signifikan yaitu sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,05, maka untuk etika (b2) menunjukkan signifikan ataupun ada pengaruh variabel etika terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya untuk tingkat signifikan dari transparansi dan etika X2M (b3) yaitu sebesar 0,508, yang menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang berarti b3 tidak signifikan. Karena hasil koefisien b2 signifikan dan b3 menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka untuk penggunaan etika termasuk dalam kategori variabel prediktor (tidak dapat memoderasi) dalam artian memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan tanpa melalui interaksi dengan variabel transparansi.

Hasil untuk uji dari nilai selisih mutlak memberikan hasil bahwa untuk moderating X2\_M memiliki t-hitung yaitu sebesar -0,148 yang menunjukkan angka lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,003 dengan tingkat signifikan yaitu 0,883 yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Maka untuk hasil nilai koefisien pada beta unstandardized moderasi variabel transparansi dengan etika yaitu sebesar -0,021. Hal ini berarti variabel etika bukan merupakan variabel yang dapat dimoderasi ataupun yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi hipotesis kelima yang menyatakan bahwa etika memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (H5) tidak diterima.

Selanjutnya untuk hipotesis keenam hasil uji pada tabel diatas dapat dilihat etika (b2) memiliki tingkat signifikan yaitu sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,05, maka untuk etika (b2) menunjukkan signifikan ataupun ada pengaruh variabel etika terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya untuk tingkat signifikan dari penerapan standar akuntansi dan etika X3M (b3) yaitu sebesar 0,508, yang menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang berarti b3 tidak signifikan. Karena hasil koefisien b2 signifikan dan b3 menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka untuk penggunaan etika termasuk dalam kategori variabel prediktor (tidak dapat memoderasi) dalam artian memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan tanpa melalui interaksi dengan variabel penerapan standar akuntansi.

Hasil untuk uji dari nilai selisih mutlak memberikan hasil bahwa untuk moderating X3M memiliki t-hitung yaitu sebesar -0,667 yang menunjukkan angka lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,003 dengan tingkat signifikan yaitu 0,508 yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Maka untuk hasil nilai koefisien pada beta unstandardized moderasi variabel penerapan standar akuntansi dengan etika yaitu sebesar -0,086. Hal ini berarti variabel etika bukan merupakan variabel yang dapat dimoderasi ataupun yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi hipotesis keenam yang menyatakan bahwa etika memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan (H6) tidak diterima.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $t = 3,326$  terbukti signifikan dengan nilai  $p = 0,002 < 0,05$  dan H1 diterima. Nilai koefisien beta sebesar 0,257 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini akuntabilitas akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan karna akuntabilitas berhubungan dengan bebuah kewajiban atau tanggung jawab yang diterapkan secara berkala untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya selama periode-periode sebelumnya. Kesadaran yang tinggi terhadap pertanggungjawaban instansi terhadap pencatatan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan akan meningkatkan

reliabilitas atau kehandalan laporan keuangan dalam menyajikan informasi penting terkait transaksi daerah. Analisis yang cermat terhadap potensi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan tersebut, memungkinkan perbandingan dengan laporan sebelumnya.

Hasil analisis ini sesuai dengan teori agensi dimana untuk menghasilkan nilai kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan akuntabilitas yang tinggi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin mudah dipahami oleh publik maupun pengguna laporan keuangan daerah tersebut sehingga nilai pelayanan publik yang optimal sebagaimana tujuan dari konsep teori agensi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Yusri, (2022), Tahir dkk., (2021) dan Vidyasari, (2021) konsisten atas penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $t = 1,933$  terbukti signifikan dengan nilai  $p = 0,058 < 0,05$  dan H2 tidak diterima. Nilai koefisien beta sebesar  $0,174$  menunjukkan arah pengaruh yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Keterbukaan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat, atau yang dikenal dengan transparansi, dilandaskan pada keyakinan bahwa publik berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah, serta kepatuhannya terhadap aturan yang berlaku.

Penelitian ini menemukan bahwa transparansi tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah terkait belum menyampaikan seluruh informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya kepada publik, kemungkinan karena alasan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi harus dilakukan dengan sebaik mungkin, bersikap terbuka dan jujur, serta selalu membangun kepercayaan dan tanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini memberikan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ferlia dkk., (2023) menyatakan bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian (Riyanti, 2017; Septiningtyas, 2017; Putri dan Akbar, 2022) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $t = 4,066$  terbukti signifikan dengan nilai  $p = 0,000 < 0,05$  dan H3 diterima. Nilai koefisien beta sebesar  $0,376$  menunjukkan arah pengaruh yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena semua transaksi dilaporkan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Andriany dan Antoine, (2019) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berdampak positif dan signifikan pada kualitas Laporan Keuangan. Didukung oleh penelitian (Qomah, 2021; Pujanira dan Taman, 2017; Jati, Ikriyati dan Aprila, 2019) yang menyimpulkan jika penerapan standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan juga akan menjadi baik.

### **Etika Dalam Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa etika memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,007 dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 0,004. Nilai koefisien beta sebesar 0,320 menunjukkan adanya pengaruh positif, maka penambahan etika pada aspek akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dicapai. Analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa etika bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat dapat diterima. Etika adalah prinsip-prinsip perilaku atau norma-norma perilaku yang diterima dan dipraktikkan oleh individu atau kelompok tertentu. Pegawai atau staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah atau aset harus memiliki etika dan keterampilan yang baik agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Dengan demikian, agar laporan keuangan daerah memiliki kualitas yang baik, diperlukan orang yang kompeten dan memiliki etika kerja yang baik (Alfiyyah dkk., 2022). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veliani, (2020) dan Dewi, (2021) yang menyatakan bahwa etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kontribusi etika dalam memperkuat akuntabilitas secara langsung didukung oleh teori deontologi dimana integritas dan kewajiban moral menjadi prioritas utama. Teori deontologi menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan semua pihak yang terlibat dan mendorong akuntabilitas dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. teori deontologi merujuk pada pandangan etika yang menekankan kewajiban moral atau tugas yang harus diikuti tanpa memandang konsekuensinya. Dalam hal ini akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan ini dapat diartikan sebagai kewajiban etis yang dimiliki oleh pegawai untuk memastikan bahwa laporan keuangan diproses dan disajikan dengan benar, tidak hanya karena hasilnya, tetapi karena itu adalah tindakan yang benar secara moral.

#### **Etika Dalam Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa etika memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Dimana hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t sebesar -0,148 dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 0,883. Nilai koefisien beta sebesar -0,021 menunjukkan adanya pengaruh negatif, maka penambahan etika pada aspek transparansi dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang dicapai. Hasil ini menunjukkan bahwa etika tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara transparansi dan kualitas laporan keuangan dalam konteks penelitian ini.

Dalam proses pelaporan keuangan tersebut, seorang pegawai dituntut untuk bersikap jujur, adil dan sebenar-benarnya sehingga dibutuhkan etika yang baik demi mencegah terjadinya benturan kepentingan. Dikarenakan seseorang yang memiliki etika yang baik yakni orang yang bersikap sopan santun, mentaati perintah, jujur, serta membenarkan yang haq (benar) dan melawan yang batil (salah). Namun dalam penelitian ini, tidak menemukan pengaruh signifikan sebagai pemoderasi antara transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Diperkuat oleh teori deontologi dimana dapat mendorong praktik transparansi dalam laporan keuangan SKPD Kabupaten Enrekang. Jawaban dari responden yang diambil dari SKPD merasa memiliki kewajiban moral yang kuat untuk menyajikan informasi keuangan dengan jelas dan akurat kepada publik karena ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemegang posisi pemerintahan.

#### **Etika Dalam Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hipotesis kelima (H6) dalam penelitian ini menyatakan bahwa etika memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Dimana hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t sebesar -0,068 dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 0,508. Nilai koefisien beta sebesar -0,086 menunjukkan adanya pengaruh negatif, maka penambahan etika pada aspek penerapan standar akuntansi dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang dicapai. Hasil ini menunjukkan bahwa etika tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara

penerapan standar akuntansi dan kualitas laporan keuangan dalam konteks penelitian ini.

Variabel moderasi, yakni etika, bukanlah faktor utama yang mendorong kebutuhan untuk memahami dengan tepat dan rinci penerapan standar akuntansi. Namun, hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena organisasi SKPD Kabupaten Enrekang belum menerapkan penerapan standar akuntansi melalui etika dengan baik dalam pembuat laporan keuangan keuangan pemerintah daerah. Sehingga penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan masih ada data dan fakta yang tidak relevan. Dengan menggunakan teori deontologi untuk mendukung argumen bahwa etika tidak memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi dan kualitas laporan keuangan, dapat ditegaskan bahwa standar akuntansi sudah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip moral yang kuat. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan seharusnya dijaga melalui penerapan standar ini, independen dari variasi etis individu atau organisasi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. hipotesis kedua (H2) tidak diterima, karena semakin rendah transparansi maka semakin kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan maka hipotesis pertama (H3) diterima. Etika dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan maka (H4) diterima karena etika dan akuntabilitas kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan. Sedangkan Etika tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, etika bukan variabel moderasi.

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan atau mengganti variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena penelitian ini hanya mengambil variabel etika sebagai variabel moderasi, diduga terdapat variabel lain yang dapat dihipotesiskan sebagai variabel moderating dan untuk instansi SKPD sebaiknya lebih meningkatkan transparansi dan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan semakin meningkat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, J., Saleh, H., & Chahyono, C. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur. *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 105–111. <https://doi.org/10.35965/jbm.v2i2.405>
- Adiwirya, M., & Sudana, I. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611–628.
- Alfiyyah, R., Bulutoding, L., Kara, M., Negeri, U. I., & Makassar, A. (2022). ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review Kajian Etika Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Maqasidu Syariah. 3, 102–115.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 5(July), 1–23.
- Andrianary, M., & Antoine, P. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2, 89.
- Ariani, I., Bulutoding, L., & Namla Elfa Syariati. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 65–81. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29627>
- Bulutoding, L., Alwi, Z., & Dwiayuparmitasari, R. (2020). Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad

- Tradition. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 902–912. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201109>
- Bulutoding, L., Bidin, C. R. K., Syariati, A., & Qarina, Q. (2021). Antecedents and Consequence of Murabaha Funding in Islamic Banks of Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 487–495. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0487>
- Bulutoding, L., Rahmah Sari, N., Yulia, R., & Manoppo, V. P. (2024). Ethical Implications Of Human Resource Development And Application Of Artificial General Intelligence (AGI) In The Context Of Global Business Governance. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)*, 3(1), 110–119.
- DEWI, P. (2021). Pengaruh Etika, Kompetensi, Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara ). *Ekonomi Dan Bisnis*, 3, 87–88.
- Erna. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Health Sains*, 1(5), 527–537. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i5.99>
- Etikan, I. (2017). Sampling and Sampling Methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), 215–217. <https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149>
- Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>
- Hamsinar. (2017). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 130.
- Hamsinar. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAIL)*, 3(4), 85–90. <https://doi.org/10.37251/jpail.v3i4.640>
- Hanifah, A. Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME : Journal of Management*, 4(1), 179–192. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.234>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Isramirathul Wahyu, Siska Yulia Defitri, & Nidia Anggreni Das. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 222–238. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.506>
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145>
- Kartika, Y. (2020). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang.
- Laksita, A. D., & Sukirno, S. (2019). Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 31–46. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24497>
- Lutfiyya, B., & Akhiron, A. (2022). *Ilomata International Journal of Management. Scholar.Archive.Org*, 3(1), 327–342. <https://scholar.archive.org/work/sy63srah7bdsfaghtihpmpxyqy/access/wayback/> <https://www.ilomata.org/index.php/ijjm/article/download/302/222>
- Majid, J. (2020). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *September* 2018.

- <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Majid, J., Serlianti, S., Mahdalena, M., & Muchlis, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.183>
- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>
- Novelia, L. (2021). Dividend Payout , Debt Policy , And Independent Commissioners(Empirical Study on Non-Financial SOE ' s Listed on the Indonesia Stock Exchange for Years 2010 – 2019 ). 51–72.
- Panggalo, N. A. S. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Putri, A. C. P., & Akbar, F. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 14–25.
- Qomah, S. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>
- Rahmadhani, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 2(1), 301–312.
- Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i1.11>
- Riyanti, F. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–13.
- Rochman, R., & Pawenary, P. (2020). Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pt Harum Energy Periode 2014 - 2019. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 171–184. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i2.382>
- Sako, U. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Abstrak Pendahuluan Pencapaian kinerja sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan. 2(1), 43–54.
- Sari, P. N., & Sari, N. K. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 3(2), 9–16. <https://doi.org/10.57084/bej.v3i2.879>
- Septiningtyas. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting*, 282.
- Setiyaningrum, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. *Skripsi*, 162.
- Susilawati, & Riana, D. S. (2022). Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Star*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.55916/jsar.v11i1.45>
- Suwinto, S., & Jannnag, A. R. (2022). Village Financial Transparency And Accountability (Empirical Study in Disadvantaged Villages in West Halmahera Regency). *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(1), 08–16. <https://doi.org/10.38142/ijess.v3i1.128>

- Syahrir, A. D. (2017). Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Budget Slack dengan Sikap sebagai Variabel Moderating. *InFestasi*, 13(1), 243. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3046>
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Veliani, E. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Etika dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). *Ekonomi Dan Bisnis*, 3, 74–95.
- Vidyasari, F. N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Wijaya, K. (2019). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Umkm Serta Prospek Implementasi Sak Etap. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 89–100. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i2.9>
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif : Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>
- Yanti, R. D. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran dengan Etika Kerja Islam sebagai Variabel Moderasi (Studi pada .... <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19774/>
- Yusri, A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Sistem Informasi Akuntansi*, 3.